



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA BRIN, KEPALA BIG  
DAN KEPALA BAPETEN**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 34 (tiga puluh empat)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 22 September 2022  
Waktu : Pukul 13.54 WIB s.d. 14.33 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI).  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : Penyesuaian RKA-K/L TA 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.  
Hadir : 33 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI.
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

4 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.

3. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
4. Ismail Thomas, S.H, M.Si

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin.
4. Ir. Lamhot Sinaga.
5. Bambang Hermanto, S.E.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto.
2. Ramson Siagian
3. Katherine A. Oendoen .
4. Iwan Kurniawan, S.H.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
3. H. Marwan Ja'far.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. H. Rofik Hananto, S.E.
3. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc (Kepala BRIN)
2. Muh. Aris Marfai (Kepala BIG)
3. Sugeng Sumbarjo (Kepala BAPETEN)

**JALANNYA RAPAT :**

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Kepala Bapeten dan Kepala BIG Badan Informasi Geospasial.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera kami sampaikan.

*Om swastiastu.*

*Namo buddhaya.*

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI akan segera bergabung nanti Pak Bambang Haryadi dan Pak Maman, dan Pak Doni Oekon nanti akan bergabung melalui virtual *meeting*.

Yang kami hormati juga segenap Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir, baik melalui hadir langsung di forum ini maupun melalui virtual *meeting*.

Yang kami hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN beserta jajarannya.

Serta yang kami hormati juga Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten beserta jajarannya.

Yang kami hormati Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) beserta jajarannya.

Pertama-tama kita bersyukur ya Allah kehadiran-Mu bahwa kita semuanya Engkau karunia nikmat sehat wal'afiat, sehingga kita semuanya dapat berkumpul dalam ruangan ini tetap dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkah kita semuanya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan

Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan 1 Tahun 2022-2023, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BRIN, Kepala Bapeten dan Kepala BIG dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dengan agenda penyesuaian RKAKL tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Sebagaimana kita ketahui Bapak/Ibu sekalian ada pagu anggaran yang diajukan pemerintah dan beberapa waktu lalu kita telah melakukan Rapat Kerja konsinyering, lantas kita hari ini mendengarkan apa yang direalisasi oleh Badan Anggaran.

Bapak/Ibu sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 25 Anggota dari 51 Anggota dan 8 fraksi dari 9. Dengan demikian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) dan juga Pasal 276 ayat (1) bahwa ini telah dinyatakan kuorum, dan khusus Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka pada dasarnya, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah disetujui Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)**  
**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.54 WIB)**

Atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT:SETUJU)**

Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat agar rapat ini selesai maksimal pukul 15.00 WIB begitu, sekarang pukul 14 lewat 5, setuju Bapak/Ibu sekalian ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Baiklah, Bapak/Ibu yang kami hormati.

Berdasarkan surat dari Pimpinan Badan Anggaran Republik Indonesia Nomor B/16721/AG0502/09/2022, tertanggal 20 September Tahun 2022 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023. Maka disampaikan alokasi belanja BRIN, BIG dan Bapeten untuk Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebagai berikut pertama, dengan kode Badan Anggaran



042 yakni atas nama Lembaga BRIN sebagaimana terpampang di depan, alokasi APBN tahun 2023 berupa rupiah adalah sebesar 6,388 triliun sekian-sekian. Demikian juga Badan Informasi Geospasial dengan kode Badan Anggaran 083 dengan anggaran 430,3 miliar. Demikian juga Bapeten dengan kode Badan Anggaran 085 sebesar anggarannya dalam bentuk rupiah yakni 124,4 miliar.

Bapak/Ibu sekalian.

Penyesuaian hasil Badan Anggaran besarnya sama dengan yang diputuskan dalam RDP yang lalu, untuk itu apakah masih ada tambahan penjelasan dari Kepala BRIN, Kepala Bapeten dan Kepala BIG kalau memang ada kami persilakan.

Untuk selanjutnya Kepala BRIN memberikan penjelasan, dipersilakan yang terhormat.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Seperti telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi jadi pagu anggaran alokasi untuk BRIN untuk Tahun Anggaran 2023 itu tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp6.387.969.063.000. Kemudian dari alokasi tersebut jadi pagu anggaran BRIN tahun 2023 itu terbagi di program riset dan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, program dukungan manajemen serta gaji dan operasional. Dan terkait dengan fungsi yaitu ada di fungsi pelayanan umum, pendidikan dan mohon maaf di fungsi pelayanan umum dan fungsi Pendidikan.

Demikian Bapak Ketua yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Apa yang disampaikan dengan demikian tidak ada catatan sama sekali ya karena ini yang direalisasi oleh Badan Anggaran persis dari hasil Rapat Dengar Pendapat atau Raker yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, begitu?

Dari Kepala BIG, dari Kepala Bapeten hal yang sama atau di anggap cukup. Oke baiklah kalau memang demikian masih ada dari yang terhormat tadi Bu Andi nanti selanjutnya Pak Mulyanto, Mulyanto Sartono bukan ya?

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc):**

(suara tidak terekam).

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Itu catatan dari Bu Andi bahwa betul pemanfaatan kegiatan dari sumber dananya itu anggaran itu, apakah ini LPDP yang itu ada juga istilahnya dari sumber tertentu atau memang ini murni dari apa APBN.

Coba dijelaskan.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Mohon izin Bapak Ketua, jadi dari 7 program yang ada di maaf halaman 5 itu yang dari APBN murni itu nomor, APBN rupiah murni itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sedangkan yang nomor 7 itu dari LPDP, dengan asumsi pada saat itu di tanggal 12 September telah kami sampaikan bahwa komitmen LPDP di awal tahun itu sebesar Rp150 miliar yang mereka bisa komitmenkan, tapi biasanya di bulan Mei itu baru akan ada komitmen berikutnya setelah imbal hasil itu karena mereka belum bisa memberikan komitmen dan imbal hasil yang belum diketahui, kira-kira begitu Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi begitu Bu Andi, oke kalau memang belum siap hari ini tapi catatan ini mohon nanti disampaikan dalam rapat-rapat berikut bahwa sudah di model kluster tertentu bahwa 1, 2, 3 adalah pembiayaannya ini BLU atau *what ever* apa, lantas yang LPDP juga begitu.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Sekarang kami tambahkan Pak, bisa langsung.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya kalau gitu intinya begitu Bu Andi ya, terima kasih.

Pak Mulyanto.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**



Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak Kepala BRIN, Bapak Kepala Bapeten dan Kepala BIG yang kami hormati.

Pimpinan dan Anggota sekalian.

Terkait anggaran tadi sudah dibahas, kami setuju Pak tidak ada masalah. Kami ingin mengangkat satu permasalahan Pak yang cukup ramai di publik yakni dibataalkannya, dialihkannya program **poonamallee drone** elang hitam yang tadinya adalah program militer menjadi sipil dan ini juga secara langsung ya terkesan membatalkan proyek **PSN** yang sudah ditetapkan. Ini ramai sekali terutama dari teman-teman Hankam, militer mempertanyakan hal ini karena dianggap ini merupakan keputusan sepihak.

Kami ingin mengetahui secara jelas alasan rasional dibalik itu semua, mohon penjelasan Pak.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Baik, terima kasih.

Mohon izin Bapak Ketua, jadi kami menjelaskan yang terkait **poonamallee** yang katanya dihentikan. Jadi bahwa **poonamallee** itu tidak dihentikan tetapi dilakukan refocusing ke Puna ISR Bapak, jadi untuk monitoring untuk kebutuhan non militer, untuk sipil. Mengapa itu harus dilakukan? jadi pada saat kami melakukan evaluasi terkait program **poonamallee** pada sejak bulan Juli seingat saya 2021 yang lalu, kemudian sampai pada akhirnya dilakukan uji terbang pada bulan Desember. Pada bulan Desember uji terbang tersebut tidak berhasil, sehingga itu dilakukan di Pangandaran tidak berhasil, tidak berhasil terbang dan jatuh di ujung landasan, sehingga itu mengalami kerusakan.

Nah daripada saat sebenarnya sebelum itu kami sudah, tim yang melakukan investigasi audit terkait program, semua program sebenarnya Pak Mulyanto itu kami sudah melihat memang ada masalah teknis.

Jadi ada 2 masalah sebenarnya masalah teknis dan yang kedua adalah terkait dengan masalah teknologinya. Yang masalah teknis itu adalah karena waktu itu ternyata belum dilakukan uji per tahapan. Jadi misalnya uji statis dia dinyalakan tapi tidak bergerak, kemudian uji *runway* dia jalan-jalan begitu di runway tapi belum terbang, kemudian juga uji dari setiap komponen sesuai dengan tahapan dan standar penerbangan.

Kemudian yang kedua masalah yang terkait dengan teknologi itu adalah bahwa teknologinya itu semua dari luar negeri, kecuali *platform*-nya. Jadi khususnya adalah yang paling krusial itu adalah teknologi terkait *mission system*, jadi *mission system* itu berasal dari perusahaan yang namanya **Macline** dari Spanyol dan kemudian jadi setelah uji terbang itu kami waktu itu meminta ke **Macline** agar bisa dilakukan ujian dari *mission sistemnya*. Pada

saat itu **Macline**nya malah meminta untuk oh kami saja yang melakukan uji terbang, tapi harus di Spanyol gitu.

#### SAMPAI SINI

Tentu itu kami tidak menyetujui karena kalau itu dilakukan sama saja saya membiayai risetnya **Macline** di Spanyol gitu karena kita tidak mengetahui apa-apa begitu. Jadi pada akhirnya **Macline** menyatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan intinya, mengapa dia tidak mau? karena dia tidak bisa melepaskan *property right*-nya.

Melihat itu tentu ini menjadi problem besar Bapak karena kalau dia tidak mau melepaskan dan dia menyampaikan secara resmi menegaskan bahwa untuk berikut-berikutnya dia ingin mendapatkan hak atas lisensi dari semua yang dibuat itu sama saja akhirnya kita terkunci dengan teknologi mereka.

Oleh sebab itu, akhirnya kami putuskan bahwa kita harus melakukan pengembangan *mission system*, karena justru untuk puna pesawat udara nirawak itu teknologi kuncinya ada di *mission system* itu.

Itu sebabnya sejak tahun 2022, awal tahun, program ini *kan* dilanjutkan di bawah Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, di Pusat Riset Teknologi Penerbangan. Pada saat itu akhirnya teman-teman memutuskan kita akan masuk *ke mission system* dulu memakai pesawat LSA. Kami memiliki pesawat LSA yang pesawat kecil yang isinya hanya 2 orang itu. Pesawat itulah yang akan dipakai untuk melakukan istilahnya pengembangan *mission system* itu. Jadi karena pesawatnya kan sudah punya sertifikasi terbang, jadi kita boleh terbang, jadi..., tetapi masih ada pilotnya, tapi *mission system* yang kita kembangkan bisa dibuat berjalan, tapi masih ada pilot, sehingga kita tidak menyalahi regulasi sehingga pengembangan itu bisa dilakukan lebih cepat.

Tetapi tetap kalau kita dengan tujuan kombatan seperti semula, jadi tetap ada beberapa teknologi komponen, yang kami jadi tidak dapatkan, karena begitu Hankam itu langsung banyak restriksi. Kalau kami melakukan pembelian komponen tersebut ke luar negeri, baik dari China, dari Turki apalagi dari Amerika. Jadi karena itu kami buat itu menjadi sipil dulu gitu dan hal ini sudah kami diskusikan, kami laporkan, kami diskusikan dan disetujui di Pak Menko Ekonomi, Kemenko Ekonomi, karena seluruh PSN itu dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, bahwa kita untuk prioritas program strategis nasional itu ada perubahan target, kurang lebih seperti itu Pak Mulyanto.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Izin interaksi sedikit Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Dipersilakan Pak Mulyanto.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Jadi kami bisa mengerti ya argumen-argumennya tadi, cuma Pimpinan..., kami tetap ingin mengusulkan kepada kita semua karena persoalan pengembangan teknologi ini, apalagi yang terkait dengan militer sudah barang tentu tidak ada yang memberi secara gratis. Sudah barang tentu itu. Oleh karenanya kita harus terus berusaha mengembangkan ini, terutama tadi mission programnya ya, jangan sampai program ini dihentikan tapi hanya ditunda, dialihkan dulu untuk nanti akan kita kembangkan karena kita ingin seperti Turki atau Amerika ya dengan *drone*-nya yang bagus luar biasa. Jangan sampai kita ya ketinggalan ya, kami tetap berharap.

Fraksi PKS mendorong agar riset Hankam ini tetap dijalankan dengan baik, demikian.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Mohon izin boleh menambahkan sedikit Bapak.

Terima kasih Pak Mulyanto atas dukungannya, jadi kami memang mengubah strategi Pak Mul, dan itu juga sebabnya mengapa di BRIN tidak ada yang namanya Pusat Riset Teknologi Hankam. Jadi karena kalau kita ada istilah militer itu, kami selalu mendapat kesulitan. Jadi misalnya dengan IU itu sudah pasti itu tertulis bahwa tidak boleh untuk Hankam. Sehingga kalau BRIN dianggap sebagai entitas Hankam, itu akan menjadi masalah besar.

Dan kami sudah mendiskusikan juga dengan Pak Prabowo dan tim Kemenhan, bahwa kita strateginya adalah penguasaan teknologi kunci di sipilnya karena sebenarnya sama saja pada prinsipnya. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengakses teknologi-teknologi itu, ini tidak hanya **Puna** Pak Mul jadi termasuk yang kapal riset juga sama, juga yang di pesawat juga sama, termasuk yang di apa ini namanya yang mekatronic biar nanti bisa dipakai untuk senjata itu juga sama.

Jadi apakah nanti kemudian di aplikasikan untuk teknologi militer, itu sedangkan urusan belakangan, tapi yang penting kita menguasai dulu teknologi kunci sehingga kita bisa menerbangkan **Puna** dengan baik, sesuai standar dan aman. Baru kemudian nanti dialihkan, itu masalah berikutnya. Sehingga kita tidak mengurangi restriksi di awal lah, kurang lebih seperti itu Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**



Iya saya kira sepakat ya.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Sedikit Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Jadi kami juga ingin mengusulkan Pimpinan, ini kan BRIN tidak ada tambahan ya, sementara Komisi I bu, khusus Hankam kan ada tambahan yang cukup besar kami melihat. Oleh karenanya ini sudah sepatutnya Riset yang ujung-ujungnya terkait Hankam, harusnya ada *share* pendanaan dari Kemenhan, jangan hanya dari Komisi VII ini saja, sehingga betul-betul berbagai kementerian mendukung program nasional ini.

Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Luar biasa saya kira menjadi catatan, saya setuju kalau tadi menyebut saya PKS, kami Nasdem juga sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Mulyanto. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyanto saya kira sangat *substance* betapa memang teknologi itu pasti akan..., apalagi teknologi pertahanan, itu kita sudah tahu betul.

Di konteks teknologi yang lain misalnya bagaimana pengalaman kita, *enggak* usah jauh-jauh, teknologi Paracetamol saja itu tidak mudah, ada Turki, ada China, ada India, ada Amerika, ada Jerman, itu tok. Hari ini sehingga ketergantungan dunia terhadap Paracetamol yang merupakan petrochemical industri yaitu bahan baku seluruh obat *nggak* bisa didapat, itu sebagai contoh, tapi betul bahwa kita juga akan terus melakukan upaya itu. Makanya perlunya intelijen industri kan begitu.

Dan hal lain saya juga menambahkan apa yang disampaikan Pak Sartono, eh ko Sartono, Pak Mulyanto, kita jangan bangga Pak Kepala BRIN kalau dengan di BRIN ini maka anggaran riset bisa turun. Justru kita agak malu kepada dunia karena ada rasio dengan PDB biasanya, sebuah negara pembiayaan riset adalah *complete* with PDB itu berapa, negara maju sampai sekian persen kan begitu, bahkan korporasi sangat ditentukan oleh risetnya.

Nah ini menjadi perhatian, jangan semata-mata menepuk dada karena turunnya anggaran itu, kok kita bangga, kalau perlu *nggak* ada riset *nggak* ada biaya kan gitu kan, bukan itu artinya. Saya tahu yang anda maksud adalah

efektivitas birokrasi dan sebagainya, tapi jangan itu yang menjadi penekanan. Riset di Indonesia biayanya turun, itu agak malu kita kepada dunia.

Oke ini satu masukan juga, jadi itu Bapak/Ibu yang lain yang terhormat, masih ada memberi masukan?

**F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):**

Sedikit boleh Pak Ketua?

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya dipersilakan Pak Menteri.

**F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):**

Baik, terima kasih.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore.

Salam sejahtera buat kita semua.

Jadi saya memberi catatan juga mengenai drone maupun teknologi yang lain Pak Kepala BRIN, yang namanya alih teknologi itu nggak ada, udah Jadul itu. Sementara belanja kita untuk produk luar negeri itu sangat besar, setiap kementerian ratusan miliar. Senjata aja barangkali kita, peluru kita udah bikin belum ya, di Pindad ada ya. Tapi kan lisensinya dari Swiss kalau nggak salah, dari mana itu lisensi peluru-peluru saja tuh.

Jadi yang namanya teknologi ya kita harus kejar, harus riset sendiri, yang jadi pertanyaan saya kalau misalnya, tadi oke lah strategi saya setuju lah. Kan semua riset ditarik ke BRIN, terus BRIN nggak mau yang militer, padahal semua *high-tech*, produk *high-tech* di suatu negara itu *the high class* itu, *the high priority* itu ya militer, di manapun tuh negara, seperti drone wilayah kita seluas ini, Brimod kita, tentara kita ditembakin terus oleh gerakan apa ini, apa namanya yang di Papua tuh KKP apa istilahnya.

Jadi kita butuh drone lebih banyak. Memang Pak Kepala BRIN bahwa nggak mungkin juga kita membeli semua perangkat tidak ada impor, pasti ada impornya tapi itu katakanlah merupakan **...(suara tidak jelas 25.38)** yang penting platform-nya dari kita, desainnya dari kita, bertahap kita membuat peralatannya itu.

Artinya saya melihat begini, pertanyaan saya itu tadi kalau misalnya semua ditarik riset dari kementerian, lembaga dikoordinasikan oleh BRIN terus siapa yang mau riset militer ini. Kalau itu memang dilakukan tapi kemudian dikatakan strategi saya bisa memahaminya, tapi kalau tidak sama sekali tentang militer, itu kita bahaya.

Jadi dulu pernah dihitung Pak Kepala BRIN kalau sekiranya kita perang sama Malaysia, cuma sebulan kita bisa bertahan, itu dengan Malaysia yang kecil itu. Jadi kita tidak punya kemampuan senjata, kalau kita bicara dengan Menteri Pertahanan lebih seru lagi mungkin kita kembali ke bambu runcing, rata-rata tantara kita nembaknya berapa, rata-rata per tahunnya cuma belasan atau puluhan peluruh gitu.

Sementara tantara-tentara negara-negara lain itu ribuan per bulan gitu latihan menembaknya. Makanya orang Indonesia tuh kalau disuruh nembak kaki kan kena kepala Pak, kalau Pak Ketua nembak mata kena hati ya, dari sawah turun ke kali ya.

Baik, itu saja masukan saya. Ini sesuatu yang sangat urgen, kita harus menghasilkan sesuatu dan inovasi itu sekarang yang mahal harganya di dunia.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Betul sekali Pak Menteri, terima kasih tambahannya betul. Teknologi apapun *advance* terhadap industri militer, teknologi komunikasi apalagi namanya dulu dari morse sampai SMS, WA dan sebagainya *enscript* hari ini pun dari teknologi militer.

Itulah betapa pentingnya Pak Kepala BRIN bahwa riset kita harus kuat betul, termasuk bagaimana menyiasati barikade-barikade semacam itu. Kita harus riset untuk kepentingan militer apapun ceritanya, sehingga kita punya kemandirian dalam hal pertahanan. Pertahanan tidak sekedar fisiknya tetapi juga menyangkut tentang kewilayahan yang istilahnya tidak fisik.

Saya kira itu kalau masih ada dipersilakan, kalau memang sudah tidak ada. Itu tadi beberapa masukan maka kita segera kepada kesimpulan, siapa ini, Pak Willy.

Dipersilahkan yang terhormat Pak Willy.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Bahwa program BRIN ini kan kalau kita lihat di 2022 ini cukup banyak, kemudian waktu juga sudah hampir terbatas. *Inikan* kita hampir masuk Oktober, berarti tinggal 3 bulan. Maka oleh karena itu saya ingin sekali, terutama TA saya atau staf saya inikan maunya intensif untuk berkomunikasi dengan BRIN ini, mereka-mereka yang menangani baik itu Bimtek ya, MBBM, kemudian RIN termasuk juga di sana itu PBR dan Balitbang.

Maka untuk itu saya ingin mengingatkan kita semua teman-teman juga karena program 3 bulan ini bisa kita kebut, kemudian dulu masih ada banyak kendala untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang masih *jelimet*.



Maka untuk itu saya minta nanti melalui Kepala BRIN untuk bisa menghususkan komunikasi dengan TA-TA kami untuk bisa mempercepat, khususnya untuk Kalimantan Tengah.

Terima kasih Pak Ketua, itu yang mau saya sampaikan.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Willy perlu kami informasikan, betul bahwa tadi kita sudah sepakat juga bahwa segala program *me-refer* apa yang sudah menjadi terjadi, pengalaman empirik masa lalu beberapa hal yang terjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat dan sebagainya harus sudah tidak terjadi lagi. Maka tadi sepakat kita akan dibentuk semacam, apa ya.. pelaksana yang bertanggung jawab langsung *key person* dari BRIN, yakni tadi sudah sepakat disampaikan bahwa setiap *key person* 1 itu *mengampu* 5 Anggota yang terhormat dengan nanti TA-TA-nya berhubungan langsung.

Saya kira tadi betul yang diingatkan oleh Pak Willy adalah ingatan kita semuanya, sehingga tidak perlu terjadi lagi. Bahkan secara eksplisit tadi disepakati rapat ke depan ini adalah penanggung-penanggung jawab program. Tadi sudah hadir di tengah-tengah kita, setidaknya juga sudah dikenalkan dan segera dilakukan rapat-rapat teknis antara penanggung jawab-penanggung jawab dari BRIN dengan TA-TA kita. Sehingga hal-hal yang tidak perlu terjadi tidak terulang lagi.

Saya kira itu Pak Willy terima kasih masukannya. Iya hari ini sudah dapat, kalau memang ada.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Kalau di level KPA-nya ada Pak, kalau boleh ya.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Dipersilakan, kalau memang iya, sudah ada, barista misalnya ....*(suara tidak jelas 31.39)*

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Mohon izin jadi kalau untuk barista itu KPA-nya itu Pak Edi Giri. Kemudian untuk PBBR itu Pak Agus Haryono, kemudian untuk Fumi dan GRI itu Pak Hendrian.

**F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, TA catat dulu itu di papan tulis.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Untuk MBBM Pak Hendrian ya sama, Fumi GRI, MBBM itu dengan produk inovasi itu Pak Hendrian.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi 3 bidang ya Pak, Fumi, GRI.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

4 Bapak, nomor 3 sampai nomor 6 Bapak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Mana Pak, siapa tadi.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Pak Hendrian.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Coba dibuka biar kita kenal.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Terus riset dan inovasi Indonesia maju RIIM itu Pak Agus Haryono.  
Demikian Pak.

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, nanti segera di administrasi Sekretariat mencatat, begitu cukup Bu Andi? Oke.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Saya kira sudah, kita semuanya sudah kita bahas mudah-mudahan dari anggaran yang ada dan sebagainya dengan proses nanti bagaimana realisasi anggaran telah kita juga bahas.

Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dipersilahkan untuk dipresentasikan di depan.

Bapak/Ibu sekalian.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Kepala Bapeten dan Kepala BIG, Kamis 22 September tahun 2022.

1. Komisi VII DPR RI menyetujui anggaran belanja BRIN APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil penyesuaian di Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp6.387.969.063.000, hal itu terdiri dari:
  1. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengawasan fungsi, maaf fungsi pelayanan umum yakni sebesar Rp2.213.764.569.000 setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)**

2. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan sebesar Rp32.800.000.000, setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)**

3. Program dukungan manajemen untuk fungsi pelayanan umum mencapai Rp4.141.404.494.000, setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)**

Sehingga Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat, total Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk anggaran tahun 2023 totalnya berjumlah Rp6.387.969.063.000, Bapak/Ibu sekalian setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Tadi telah kita sepakati kesimpulan yang pertama, kedua:

4. Komisi VII DPR RI menyetujui anggaran belanja Bapeten APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil penyesuaian di Badan Anggaran yakni sebesar Rp124.385.248.000, setuju Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)**

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yakni untuk pelayanan umum sebesar Rp28.427.657.000.
2. Program dukungan manajemen untuk pelayanan umum sebesar Rp98.957.591.000.

Dengan demikian sebagaimana disebutkan di muka bahwa total anggaran dari Bapeten adalah Rp124.385.248.000.

**(RAPAT:SETUJU)**

Komisi VII DPR RI menyetujui anggaran belanja Badan Informasi Geospasial APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil penyesuaian dari Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp430.312.478.000, jumlah tersebut meliputi:

1. Program penyelenggaraan informasi geospasial dengan fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp275.782.297.000.
2. Program dukungan manajemen yakni perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp154.530.181.000.

Dengan demikian Bapak/Ibu sekalian, bahwa total anggaran Tahun Anggaran 2023 untuk Badan Informasi Geospasial sebesar Rp430.312.478.000, setuju Bapak/Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)**

Bapak/Ibu sekalian.

Demikian tadi rapat hari ini telah kita membahas khusus anggaran tahun 2023 dan kita telah setuju besaran angkanya. Dengan demikian kita akan segera akhiri rapat ini, sebelum kita akhiri dipersilakan Kepala BRIN untuk menyampaikan *closing statement* dan harapan-harapan ke depan atau juga berupa komitmen-komitmen ke depan bagaimana BRIN menjadi Badan Riset Nasional yang berkelas internasional mampu menghasilkan produk-produk riset yang mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang hebat ke depan.

Dipersilakan yang terhormat.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mohon izin untuk menyampaikan penutup bahwa kami di BRIN dan juga mungkin Bapeten dan BIG mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu, serta pembahasan terkait anggaran kami untuk Tahun Anggaran 2023 mendatang. Dan kami berharap dengan anggaran ini kami bisa melaksanakannya dengan amanah, sehingga bisa menjadikan BRIN dan juga LPNK yang lain itu menjadi lebih baik dan mampu berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian saya kembalikan kepada Pak Pimpinan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/ F.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan demikian Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat, baik yang hadir melalui forum langsung ini maupun melalui virtual dan juga beberapa Pimpinan yang tadi berjanji mau datang. Dengan demikian rapat dengan Kepala BRIN dan Kepala Bapeten serta Kepala BIG dengan seluruh jajarannya dalam rangka fungsi anggaran dan dinyatakan untuk ditutup.

*Billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.50 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

**Dra. Nanik Herry Murti**  
**NIP.196505061994032002**

